

PEMERINTAH KOTA DUMAI
KECAMATAN BUKIT KAPUR

JALAN AGENDA KELURAHAN BUKIT NENAS KODE POS : 28841

Email : kecamatan_bukitkapur@yahoo.co.id



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKj IP)**

TAHUN 2022

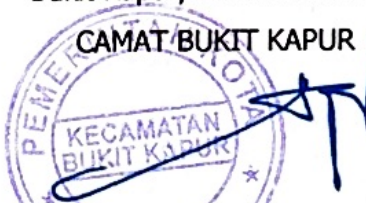
KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas terselesainya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2022 guna melaksanakan ketentuan sebagaimana amanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah, yang kemudian disusun menurut tata cara dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan semangat menuju Visi dan Misi sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran kegiatan (outcome) tahun 2022 dengan menyajikan informasi realisasi kinerja serta akuntabilitas keuangan Kecamatan Bukit Kapur Tahun Anggaran 2022.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Bukit Kapur ini sehingga saran dan masukan dari pihak-pihak terkait sangat kami harapkan demi kesempurnaan Laporan ini dimasa mendatang. Demikian dan wassalam.

Bukit Kapur, 02 Januari 2023


CAMAT BUKIT KAPUR

AGUS GUNAWAN, S.Sos
Pembina /IV.a

NIP. 19770831 200003 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan tujuan	2
1.3 Isu Strategis	2
1.4 Struktur Organisasi.....	3
1.5 Dasar Hukum	4
1.6 Sistematika Pelaporan	4
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Perencanaan Kinerja	7
1. Visi	7
2. Misi	7
3. Tujuan	8
4. Sasaran	8
5. Strategi dan Kebijakan	8
6. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran.....	13
B. Perjanjian Kinerja	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Realisasi Keuangan	19
BAB IV PENUTUP	24
Lampiran	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 beserta Lampiran	

DAFTAR TABEL

TABEL	URAIAN	HALAMAN
TABEL II.1	KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	8
TABEL II.2	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	10
TABEL II.3	PENJELASAN MISI DENGAN TUJUAN	11
TABEL II.4	PENJELASAN MISI DENGAN STRATEGI	11
TABEL II.5	PENJELASAN MISI DENGAN ARAH KEBIJAKAN	12
TABEL II.6	SASARAN PRIORITAS PROGRAM	12
TABEL II.7	PERJANJIAN KINERJA	14
TABEL II.8	REALISASI CAPAIAN TARGET PERJANJIAN KINERJA	14
TABEL III.1	CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA	15
TABEL III.2	TABEL PENGUKURAN KINERJA	16
TABEL III.3	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN SKPD	20
TABEL III.4	MATRIKS PERMASALAHAN SERTA LANGKAH ANTISIPATIF	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Bukit Kapur terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pencapaian target kinerja instansi, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana Rencana Strategis, dalam rangka perwujudan Good Governance dilingkungan Pemerintahan Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai.

Selain sebagai tuntutan akuntabilitas kinerja, LKj juga sebagai alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/ atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan atau sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Kecamatan Bukit Kapur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) punya kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan semangat menuju **“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu ”** dan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dan sebagai pertanggungjawaban amanat tersebut diatas, maka melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Kecamatan Sungai Sembilan telah melaksanakannya, yang kemudian tersusun dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Tahun 2022.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2022 adalah :

- 1 . Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan ;
- 2 . Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran ;
- 3 . Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya ;
- 4 . Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang ; dan
- 5 . Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan *clean government* menuju *good governance*, dan untuk memenuhi tiga pilar utama yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.3 Isu Strategis (strategic issued)

Permasalahan utama sebagai perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan Kelurahan/masyarakat, Kecamatan merupakan perpanjangan dari pemerintah Kota. Sehingga segala hal/bidang/sektor akan melibatkan pihak Kecamatan. Namun dengan begitu kursialnya Kecamatan belum diimbangi dengan adanya pendanaan yang cukup, sarana prasarana memadai dan SDM aparatur yang memadai. Kecamatan bisa dikatakan bahwa “Kota Kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Kecamatan selama ini belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana SKPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari Walikota.

Banyak kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh Kecamatan. Meskipun di tingkat

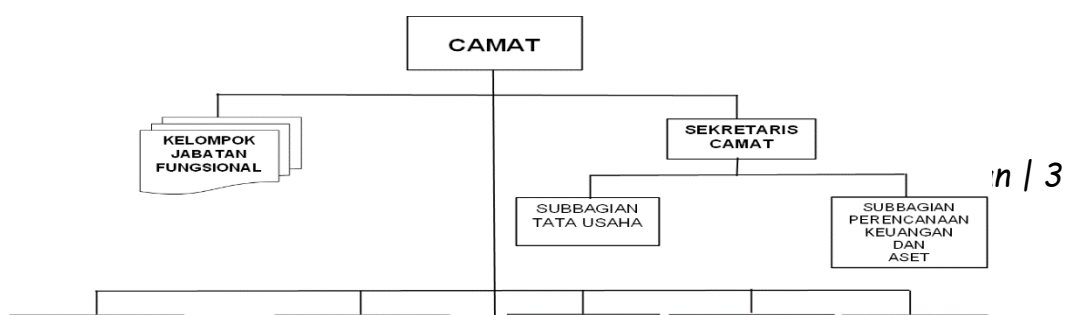
Kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak Kecamatan. Setiap permasalahan di lapangan yang selama ini muncul yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak Kecamatan (Camat). Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Sungai Sembilan, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

1.4 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Nomor 17 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan, terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretariat
 1. Subbagian Tata Usaha
 2. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
8. Kelompok Jabatan Fungsional
9. Kelurahan

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA KECAMATAN BUKIT KAPUR



1.5 Dasar Hukum

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme;
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme;
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor. 08 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021.
- Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor. 02 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021.

1.5 Sistematika Pelaporan

Laporan Kinerja Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai terdiri dari beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum Perangkat Daerah dengan penekanan kepada aspek organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi Kecamatan Bukit Kapur.

Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kecamatan Bukit Kapur

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Perangkat Daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Perangkat Daerah. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut ;

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian (pernyataan kinerja).

B. Realisasi anggaran Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2022.

C.

Bab IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum yang atas capaian kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Kecamatan Bukit Kapur dalam rangka peningkatan kinerjanya.

Lampiran :

- Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- Rencana Kinerja Tahunan 2022
- Rencana Aksi dari Perjanjian Kinerja 2022
- Pengukuran Kinerja Tahun/ Evaluasi IKU Indikator Kinerja Utama (IKU)

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

1. Visi

Kecamatan Bukit Kapur dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi mengacu pada Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu ”

Visi tersebut diatas dimaksudkan untuk dijadikan pedoman Kecamatan Bukit Kapur sebagai lembaga yang berkomitmen untuk memenuhi tanggungjawab yang diamanahkan serta *berkhidmat untuk melakukan* pelayanan prima dan professional kepada masyarakat, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif, sesuai Visi RPJMN adalah “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sedangkan Visi RPJMD Provinsi Riau adalah “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat, dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.

2. Misi

Kecamatan Bukit Kapur memiliki tanggungjawab dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai diamanahkan untuk bekerja menjalankan Misi pembangunan Kota Dumai yang ke. 4, yaitu ;

“Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik”

Misi tersebut menjadi sasaran strategis Kecamatan Bukit Kapur meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan.

3. Tujuan

Kecamatan Bukit Kapur sebagai perangkat daerah Kota Dumai memiliki tujuan Program Kecamatan yaitu ; **Mewujudkan kualitas pelayanan publik, Pemberdayaan masyarakat kelurahan, Ketentraman dan ketertiban umum, dan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**

4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Bukit Kapur adalah **Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan.**

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagai berikut ini;

Tabel II.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : “Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu ”

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik	Mewujudkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan.

5. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analistis, realistis, rasional dan

komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh SKPD yang bersangkutan.

Guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Kecamatan Bukit Kapur, strategi yang ditempuh adalah :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan .
3. Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah yang didukung dengan pelayanan prima, profesionalitas aparatur yang berkarakter melayani.
4. Memperkuat kelembagaan pengembangan partisipasi masyarakat dalam rangka peningkatan pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Kebijakan adalah arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Bukit Kapur dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, meliputi :

1. Meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai dalam rangka mewujudkan pelayanan prima.
2. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur berbasis kompetensi dan kinerja dalam meningkatkan profesionalitas aparatur.
3. Pengalokasian Anggaran pembangunan sarana dan prasarana kelurahan pada kecamatan dalam meningkatkan peningkatan pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

TABEL II.2**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN**

VISI	Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu		
MISI	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas pelayanan dasar dan non dasar 2. Meningkatkan Kinerja Pemerintah daerah yang didukung dengan profesionalitas aparatur yang berkarakter melayani. 3. Memperkuat kelembagaan pengembangan partisipasi masyarakat dalam rangka peningkatan pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai dalam rangka mewujudkan pelayanan prima. 2. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur berbasis kompetensi dan kinerja dalam meningkatkan profesionalitas aparatur 3. Pengalokasian Anggaran pembangunan sarana dan prasarana kelurahan pada kecamatan dalam meningkatkan pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat

**TABEL II.3
PENJELASAN MISI DENGAN TUJUAN
KECAMATAN BUKIT KAPUR TAHUN 2022**

NO	MISI	TUJUAN	PENJELASAN TUJUAN
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik	Mewujudkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Menciptakan kinerja, disiplin dan profesionalisme pegawai. Mewujudkan sumber daya aparatur yang profesionalisme didalam menyelenggarakan organisasi Kecamatan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas sumber daya lembaga masyarakat serta Meningkatkan pemberdayaan masyarakat

**TABEL II.4
PENJELASAN MISI DENGAN STRATEGI
KECAMATAN BUKIT KAPUR TAHUN 2022**

NO	MISI	STRATEGI	PENJELASAN STRATEGI
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas pelayanan dasar dan non dasar 2. Meningkatkan Kinerja Pemerintah daerah yang didukung dengan profesionalitas apartur yang berkarakter melayani. 3. Memperkuat kelembagaan pengembangan partisipasi masyarakat dalam rangka peningkatan pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat 	Memberikan Pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya lembaga masyarakat serta Meningkatkan pemberdayaan masyarakat

**TABEL II.5
PENJELASAN MISI DENGAN ARAH KEBIJAKAN
KECAMATAN BUKIT KAPUR TAHUN 2022**

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	PENJELASAN TUJUAN
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kerja dalam meningkat Kinerja Aparatur dan Meningkatkan Pengawasan dalam penyelenggaraan Organisasi
		Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Meningkatkan Kinerja Sumber daya lembaga masyarakat
		Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	Mendorong terwujudnya ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Sungai Sembilan
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Mewujudkan sumber daya aparatur yang profesionalisme didalam menyelenggarakan organisasi Kecamatan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

**TABEL II.6
SASARAN PRIORITAS PROGRAM
KECAMATAN BUKIT KAPUR TAHUN 2022**

NO	SASARAN PRIORITAS PROGRAM SKPD	JUMLAH PROGRAM
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik	1 Program
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan	1 Program
3	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	1 Program
4	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kota	1 Program
	JUMLAH	4 Program

6. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Berbagai program telah dilaksanakan di Tahun Anggaran 2022 dalam rangka untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan terutama yang berkaitan dengan tugas urusan kewilayahan yang telah di serahkan kepada Camat, sebagaimana disebutkan dalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai.

Strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan dari misi yang dijadikan pedoman atau petunjuk dalam pelaksanaan program yaitu antara lain :

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance dan clean government)
2. Meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pembangunan

B. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2022 adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2016 – 2021. Penetapan Kinerja tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, yang merupakan komitmen bagi Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai untuk mencapainya dalam tahun 2022, Rencana Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**TABEL II.7
PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN BUKIT KAPUR TAHUN 2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	2		3	4
Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85
	b.	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100
	c.	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat	%	85

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2022 pada Kecamatan Bukit Kapur yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis “*Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan*” adalah sebagai berikut :

**TABEL II.8
REALISASI CAPAIAN TARGET PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN BUKIT KAPUR TAHUN 2022**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI
1	2		3	4
Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 %	99,99%
	b.	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100 %	97,37%
	c.	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat	85 %	99,99%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN BUKIT KAPUR

Pengukuran kinerja OPD merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja kegiatan (PKK), dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran, untuk dapat mengetahui hal – hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022 ;

Secara rinci pengukuran capaian kinerja / sasaran masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan pada Tabel III.1 dibawah ini:

**TABEL III.1
CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
KECAMATAN BUKIT KAPUR TAHUN 2022**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SAT	TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUN 2022
1	2		3	4	5
Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85	99,99%
	b.	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan dan Trantibum Umum	%	100	97,37%
	c.	Persentase pelaksanaan pelimpahan	%	85	99,99%

		kewenangan kepada camat			
--	--	-------------------------	--	--	--

Pengukuran Kinerja Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada tabel III.2 berikut ini :

TABEL III.2
TABEL PENGUKURAN KINERJA
KECAMATAN BUKIT KAPUR
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2021	TAHUN 2022			TARGET AKHIR RENSTRA (2022)	CAPAIAN S/D 2022 TERHADAP RENSTRA 2022
			TARGET TAHUN	REALISASI TAHUN	RASIO		
			%	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,95	85	99,99	117,64%	85	111,14%
2	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	84,94	100	97,37	97,37%	100	91,16%
3	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat	100	85	99,99	117,64%	85	117,64%

Berdasarkan table III.1 dan table III.2 diatas dapat dijelaskan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut :

- a. **Indikator Kinerja Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat.**

Target tahun 2022 cakupan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 85%, Capaian tahun 2022 adalah sebesar 99,99% atau capaian target pada Renstra 2022 adalah sebesar 117,64%.

b. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum.

Target tahun 2022 Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum adalah sebesar 100%, Capaian tahun 2022 adalah sebesar 97.37% atau capaian target pada Renstra 2022 adalah sebesar 97,37%.

c. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat.

Target tahun 2022 Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat adalah sebesar 85%, Capaian tahun 2022 adalah sebesar 99,99% atau capaian target pada Renstra 2022 adalah sebesar 117,64%.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dan beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan table III.2 diatas dapat dijelaskan Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini (2022) dengan tahun lalu (2021) sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat.

Pada capaian Target tahun 2021 cakupan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 88,95%, sedangkan Capaian sampai dengan tahun 2022 terhadap Renstra 2022 adalah sebesar 99,99%.

b. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum.

Pada tahun 2021 **Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum** adalah sebesar 84,94%, sedangkan Capaian tahun 2022 meningkat adalah sebesar 97,37%.

- c. **Indikator Kinerja Sasaran : Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat.**

Pada tahun 2021 **Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat** adalah 100% sedangkan Capaian Tahun 2022 adalah sebesar 99,99% .

3. Pebandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (2022) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

- a. **Indikator Kinerja Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat.**

Target dengan Renstra tahun 2022 **Indeks Kepuasan Masyarakat** adalah sebesar 85%, sedangkan capaian realisasi kinerja sampai dengan 2022 terhadap Renstra tahun 2022 adalah sebesar 111,14%.

- b. **Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum.**

Target Renstra tahun 2022 **Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum** adalah sebesar adalah sebesar **100%**, sedangkan capaian realisasi kinerja sampai dengan 2022 terhadap Renstra tahun 2022 adalah sebesar 91,16%.

- c. **Indikator Kinerja Sasaran : Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat.**

Target Renstra tahun 2022 **Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat** adalah sebesar 85%, sedangkan capaian realisasi kinerja sampai dengan 2022 terhadap Renstra tahun 2022 adalah sebesar 117,64%.

4. Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

- a. Keberhasilan/Peningkatan realisasi target kinerja ini diatas tidak terlepas dari dukungan, kerjasama dan partisipasi semua pihak. Upaya -upaya perbaikan terhadap kekurangan yang ada terus diupayakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan kinerja pada masa yang akan datang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Kegagalan/Penurunan ini dikarenakan oleh kurangnya kompetensi sumberdaya aparatur dalam pengelolaan manajemen pengadaan barang/jasa serta pelaksanaan dan pengawasan secara teknis pada lapangan dalam menjalankan kegiatan.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian (pernyataan kinerja).

Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat Kelurahan dikarenakan meningkatnya motivasi masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan melalui Metode Swakelola Tipe IV yang melibatkan masyarakat dalam bentuk POKMAS untuk turut aktif langsung dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan dan hasilnya langsung mereka rasa dan gunakan manfaatnya sendiri.

Hal tersebut diatas juga memberikan dampak yang positif dari masyarakat terhadap penilaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Bukit Kapur dan Pemerintah Kota Dumai Pada khususnya. Sehingga pelaksanaan tugas pelimpahan Camat dapat terlaksana dengan baik tentunya tidak terlepas dari dukungan dan dorongan Wali Kota Dumai dan Bantuan Keuangan Provinsi dari Gubernur Riau.

B. REALISASI KEUANGAN

Kecamatan Bukit Kapur secara keseluruhan telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp. **11.898.896.475,-** dengan realisasi penyerapan sebesar Rp **11.511.371.758.-** atau **96,74 %**.

Gambaran realisasi kinerja dan Anggaran Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Tahun 2022 di sajikan dalam tabel III.3 berikut ini :

TABEL III.3
TABEL REALISASI ANGGARAN
KECAMATAN BUKIT KAPUR

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBD TAHUN 2022
KECAMATAN BUKIT KAPUR

Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.5.02.2.10.05.00/001/2021

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BUKIT KAPUR

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu	Realisasi		SISA
		Rp	Rp	%	
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.251.254.975,00	9.903.755.462,00	96,610%	347.499.513
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	1. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.197.360	13.187.097	99,922%	10.263
	2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	13.197.360	13.197.360	100,000%	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.015.384.735	6.699.785.050	95,501%	315.599.685
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	61.410.800	59.760.800	97,313%	1.650.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-
	1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	38.400.000	38.400.000	100,000%	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				-

	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.628.000	19.560.200,00	99,655%	67.800
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	217.412.900	214.742.029,00	98,772%	2.670.871
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	218.260.000	217.135.000,00	99,485%	1.125.000
	3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.752.400	58.539.696,00	99,638%	212.704
	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	108.160.000	107.960.000,00	99,815%	200.000
	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128.450.000	128.359.210,00	99,929%	90.790
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-		-
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.497.000	16.497.000	100,000%	-
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.700.000	71.450.789,00	83,373%	14.249.211
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.073.958.420	2.062.849.140,00	99,464%	11.109.280
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-		-
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.516.000	68.184.091,00	99,516%	331.909
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.330.000	39.244.000,00	99,781%	86.000
	3. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	75.000.000	74.904.000,00	99,872%	96.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	24.390.900,00	24.390.407,00	99,998%	493
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		-		-
	1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24.390.900	24.390.407	99,998%	493

3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARKAT DESA DAN KELURAHAN	1.523.250.600,00	1.483.228.889,00	97,373%	40.021.711
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		-		-
	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	92.562.400	90.546.000	97,822%	2.016.400
	2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.083.927.180	1.078.800.400,00	99,527%	5.126.780
	3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	346.761.020	313.882.489	90,518%	32.878.531
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.000.000,00	99.997.000	99,997%	3.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		-		-
	1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100.000.000	99.997.000	99,997%	3.000
	TOTAL	11.898.896.475	11.511.371.758	96,743%	387.524.717

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis mengenai akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan di atas, untuk mengatasi permasalahan – permasalahan yang dihadapi tersebut diperlukan langkah antisipatif, diuraikan melalui Table III.4 matriks sebagai berikut :

Tabel III.4
MATRIKS PERMASALAHAN SERTA LANGKAH ANTISIPATIF
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN TAHUN 2022

NO	PERMASALAHAN	KONDISI YANG DIINGINKAN	LANGKAH ANTISIPATIF
1	Terbatasnya Kompetensi dan sumber daya manusia aparatur di kelurahan sehingga ada beberapa kegiatan kelurahan yang tidak melaksanakan kegiatan Dana Kelurahan tersebut.	Terpenuhinya Pejabat dan Aparatur di Kelurahan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan diimbangi dengan kualitas pengembangan diri, mengingat bahwa Kelurahan kini telah memiliki anggaran.	Pembinaan dalam bentuk bimbingan teknis dan pelatihan kepada SDM di Kecamatan dan Kelurahan untuk meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme sehubungan banyak peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pokok yang fungsi, serta peraturan teknis lainnya yang memerlukan pemahaman secara komprehensif dalam pengambilan kebijakan/putusan melakukan Tindakan yang mengakibatkan keluarnya anggaran.
2	Masih kurangnya pemenuhan anggaran yang diberikan, jika dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD sehingga untuk mencapai Target Kinerja dan program kegiatan terbatas.	Terpenuhinya anggaran yang dapat meningkatkan capaian kinerja program dan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan	Diberikannya anggaran yang memadai sesuai RPJMD untuk setiap program kegiatan Kecamatan Bukit Kapur dan Kelurahan dari APBD, Provinsi (Bankeu) dan APBN dan lain-lain.

PENUTUP

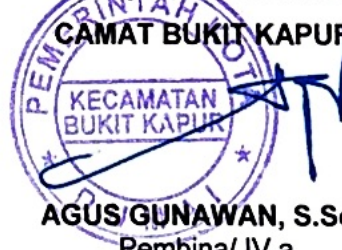
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2022 Kecamatan Bukit kapur sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran kegiatan (outcome) tahun 2022 dengan menyajikan informasi realisasi kinerja serta akuntabilitas keuangan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) juga sebagai sarana analisis pelaksanaan kinerja untuk dijadikan umpan balik bagi pengambil keputusan, pihak-pihak yang terkait, dalam memperbaiki permasalahan guna pengambilan langkah antisipatif untuk menwujukan kondisi yang diinginkan.

Langkah–langkah penyempurnaan laporan kinerja ini senantiasa merupakan prioritas, agar terwujud akuntabilitas, untuk itu diperlukan peran aktif aparatur, masyarakat dan Stakeholder.

Dengan Laporan Kinerja ini, dapat diperoleh gambaran tentang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai khususnya pada Kecamatan Bukit Kapur.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2022 OPD Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai ini disusun sebagai laporan sekaligus pertanggungjawaban kepada Bapak Walikota Dumai.

Bukit Kapur, 02 Januari 2023

CAMAT BUKIT KAPUR

AGUS GUNAWAN, S.Sos

Pembina/ IV.a
NIP. 19770831 200003 1 005